

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

WIDI AYU NOVITASARI

NPM : 1721020318

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

WIDI AYU NOVITASARI

NPM : 1721020318

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Agutina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, MHI

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Kabupaten layak anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak. Kekerasan sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak salah satunya ialah memiliki rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan sehingga menghambat tumbuh kembang sang anak secara normal seperti semula. Meskipun sudah dibuat Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Barat mengenai perlindungan anak, namun masih banyak kasus kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yakni dengan melakukan kekerasan fisik dan seksual. Jika dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah, tindak kekerasan anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum. Berdasarkan pada hukum Ta'zir, yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijakan pihak penguasa atau hakim. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?, 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat? Penelitian ini dilakukan di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan

data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data Peneliti ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widi Ayu Novitasari
NPM : 1721020318
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layyak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (studi di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat)”**. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021

Penulis,



Widi Ayu Novitasari

NPM : 1721020318

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa: Widi Ayu Novitasari

NPM : 1721020318

Program Studi : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 Tentang
Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah
(Studi Kasus Di Pekon Gedung Surian,
Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten
Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqsyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Agutina Nurhayati, S.Ag., MH.

NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, MHI

NIP.

Ketua Prodi

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarama Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (studi di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat)”** di susun oleh **Widi Ayu Novitasari NPM.1721020318** Program Studi:**Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diUjikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung .

TIM DEWAN PENGUJI

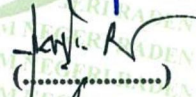
Ketua : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.


(.....)

Sekertaris : Erik R Gumiri, M.H


(.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H


(.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H


(.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I


(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP.196210211993031002**

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan.
(Q.S. Al Isra:70)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku Tercinta dan Tersayang, Ayahanda Siswanto dan Ibunda Win Haningsih yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan, memberi semangat, dukungan, motivasi, dan tak pernah hentinya selalu mendo'akan penulis agar dapat meraih kesuksesan.
2. Kakak ku tersayang Sinta Maria Ulfa dan Dwi Hestya Ningrum yang selalu memberi dukungan dan telah banyak memberikan bantuannya baik formil maupun materil serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
3. Keponakanku tersayang Muhammad Furqon Aufal Marom, Sufyan Uwais Al-Qarni dan Sabhira Mishal Naziha semoga ini menjadikan motivasi untukmu supaya dapat terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri pimpinan Romo KH. Fathul Karim BSA dan Ibu nyai HJ Masyhudah Karim beserta Keluarga dan alumni yang telah menerima penulis menjadi santri, memberi ilmu serta mendidik dengan penuh kasih sayang. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh abah dan ibu Allah Beri barokah dunia dan akhirat. Aminn
5. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Widi Ayu Novitasari dilahirkan pada tanggal 29 November 1997, di Pekon Gedung Surian kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, dan merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara dari bapak Siswanto dan ibu Win Haningsih. Berikut Riwayat Pendidikan penulis :

1. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Gedung Surian Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah AL-HIKMAH Purwoasri Kediri 2013.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah AL-HIKMAH Purwoasri Kediri yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syari'iyah.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021
Yang Membuat,

Widi Ayu Novitasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendong diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil maupun inmateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. H. Khairuddin, M.H.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. H. A Khumaidi Jaf'ar, S. Ag., M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Hj. Zuhraini S.H., M.H.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
6. Ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Frenki, M.Si.
7. Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Hervin Yoky Pradikta, M.H.I.
8. Ibu Agutina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Sukandi, MHI. selaku Pembimbing II.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 20 Januari 2021
Penulis,

Widi Ayu Novitasari
NPM. 1721020318



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Jenis dan Sifat Penelitian.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	19
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan	
a. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam (Hadhanah)	19
b. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif	52
c. Dasar Hukum Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.....	54

3. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	62
a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	62
b. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak	64
c. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak	65
d. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan ...	69
e. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak	71

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Gedung Surian	75
1. Sejarah Singkat Pekon Gedung Surian	75
2. Struktur Organisasi Pekon Gedung Surian	76
3. Latar Belakang Kekerasan Seksual pada Anak di bawah umur di Pekon Gedung Surian	78
B. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak	91
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan Seksual Pada Anak	93

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan Seksual Pada Anak	99
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Fiqh Siyasah	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Rekomendasi	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan agar terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu diberi penjelasan dan pengertian dalam memahami skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”** maka perlu dilakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.¹ Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai Dengan peraturan yang berlaku, misal seperti Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut Dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/ Kota.² Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional
3. berdasarkan pancasila, fungsinya yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Tentang Pemerintah Daerah.³

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (25).

³ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depannya* (Jakarta: Lipi Press, 2007), 12

4. Kabupaten Layak Anak yang disingkat KLA adalah kabupaten yang memiliki sistem Pembangunan dan Pelayanan Publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.⁴
5. Perspektif berasal dari bahasa Itali, *prospective* yang berarti gambar pandangan, sudut pandang.
6. Fiqh Siyasah adalah merupakan aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.⁵

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat

3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pekon Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat).

B. Latar Belakang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak

⁵ Prof.H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 35

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap orang tua menginginkan anak anaknya tumbuh baik dan berkembang secara optimal, dengan itu orang tua hendaknya memperhatikan tumbuh kembang, menjaga dari permasalahan sosial dan saling membantu tercapainya tujuan dari penyelenggara kabupaten layak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

Masih terjadi kasus kekerasan seksual pada anak di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu pada anak yang berusia 4 sampai 12 tahun yang berjumlah 30 anak diantaranya 20 anak laki laki dan 10 anak perempuan.⁶

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertanggung jawab mengatasi dan mengawal Peraturan Daerah tersebut telah melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi terkait pendidikan seksual masa dini yang dilaksanakan di sekolah dan TPA (Taman Pendidikan Al qur'an) di lingkungan Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Dengan harapan tercapainya tumbuh kembang yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Dalam kasus ini orang tua yang anaknya menjadi korban dari kekerasan seksual diduga enggan melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak dikarenakan mereka menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib bagi keluarga dengan minimnya pengetahuan orang tua

⁶ Zainal, wawancara dengan penulis, Ketua Dinas (PPA) Pekon Gedung Surian, 7 Januari 2021.

tersebut terhadap kekerasan seksual pada anak yang mengakibatkan terhambatnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

Pada pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak menyebutkan:

“Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia”.⁷

Dinas PPA telah menangani kasus kekerasan seksual pada anak tersebut, akan tetapi keluarga dari korban enggan menindak lanjut kasus kekerasan seksual pada anak dan mereka lebih memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dengan itu mengakibatkan pelaku yang tidak mendapatkan efek jera dan dikhawatirkan para pelaku tersebut tetap melancarkan aksinya. Kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah rasa trauma untuk bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak

dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual pada anak. Pemerintah harus ada upaya untuk mengajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah rasa trauma untuk bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari.

Dalam konteks *Fiqh Siyasah*, kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁸ Jika dilihat dalam konteks *Fiqh Siyasah* dengan ini Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak merupakan peraturan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) h.3

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya pengumpulan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini merupakan batas ruang dalam membangun penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat), maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikasi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
 2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui

tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat).

b. Secara Praktis

1. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat).

G. Kajian Terdahlu Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan seperti:

1. Al Apid, (2019) UIN Raden Intan Lampung. Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung), berdasarkan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Kota Bandar Lampung bahwasanya pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor2 tahun 2016 tentang

penyelenggaraan perlindungan anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan kekerasan pada anak. Namun kekerasan pada anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurang maksimalnya Implementasi terhadap peraturan daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak kota Bandar Lampung dalam pandangan Fiqh Siyasah mengenai penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. Annisa ayat 9, bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan anak di kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan QS. An-nisa ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah berupaya melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Penelitian tersebut sangat mendukung penelitian dalam skripsi ini dalam aspek kabupaten layak anak. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Al Apid cukup sedikit memberikan dukungan yang cukup untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini.

2. Rohman Arif, (2019) UIN Raden Intan Lampung. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus), berdasarkan pengamatan di dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun belum terlaksana secara maksimal disebabkan karena kurangnya fasilitas di bidang sumberdaya manusia seperti kurangnya tenaga pendamping psikologis, yang

mana selama ini masih dibantu oleh psikologis dari Unit Pelaksana tingkat Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak provinsi, kurangnya fasilitator sosialisasi tentang kekerasan anak, belum tersedianya lembaga bantuan hukum yang melekat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak “Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”, belum tersedianya gedung atau kantor yang menetap untuk menjalankan upaya peran tersebut serta kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat tentang keberadaan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian tersebut sangat mendukung penelitian dalam skripsi ini dalam aspek kabupaten layak anak. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Rohman Arif cukup sedikit memberikan dukungan yang cukup untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini.

3. Wiwied Widya Ningtyas, (2019) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak terbagi menjadi empat kategori yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya, hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial serta hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan

Anak yang merupakan urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anak di kabupaten Boyolali agar kekerasan, bullying, diskriminasi pada anak terminimalisir. Namun meskipun sudah dibentuk peraturan daerah tersebut, masih banyak kasus kekerasan pada anak yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Boyolali belum maksimal dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan hal tersebut juga berbanding dengan di sandangnya kabupaten Boyolali yang mendapat predikat Kota Layak Anak. Penelitian tersebut sangat mendukung penelitian dalam skripsi ini dalam aspek kabupaten layak anak. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Wiwied Widya Ningtyas cukup sedikit memberikan dukungan yang cukup untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian ini bisa di anggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.⁹ Khususnya pada Kabupaten Layak Anak tentang perlindungan anak di Pekon Gedung Surian,

⁹ Syahri, pokok pokok *Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 50

Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.¹⁰ Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta fakta yang ada.

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹¹ Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan juga masyarakat yang berada di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.¹² Peneliti menggunakan datalink sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 82

¹¹ Sugiyono, *Ibid*, 97

¹² Sugiyono, *Ibid*, 100

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah 329 masyarakat Pekon Gedung Surian, dan kurang lebih 100 aparatur pemerintahan di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,¹⁴ Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa apabila jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. Maka peneliti dapat menggunakan sampel pada penelitian ini adalah beberapa wawancara pada 3 (tiga) Dinas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Pekon Gedung Surian, 4 (empat) aparatur Pekon Gedung Surian, 1 (satu) Penyuluh Agama Pekon Gedung Surian, 2 (dua) orang tua/ wali anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.¹⁵ Purposive sampling juga disebut dengan judgemental Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan

¹³ Sugiyono, *Ibid*, 215

¹⁴ Sugiyono, *Ibid.*, 216

¹⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 122.

sampel oleh karena itu, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data yang digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses proses pengamatan dan ingatan.¹⁶

Observasi ini dilakukan pada lingkungan Masyarakat sekitar Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban jawaban responden dicatat dan direkam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁷ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang bersrtuktur, dan dilakukan secara tatap muka (*face to face*).

¹⁶ Sugiyono, *Ibid.* 145

¹⁷ Sugiyono, *Ibid.* 138

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹⁸

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk di analisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lazim digunakan dengan pertimbangan pendekatan yang mengambil sudut pandang hasil amatan peneliti atas dasar pengumpulan data dan interpretasi melalui kontak langsung. Dalam penelitian ini pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif yaitu mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta fakta kegiatan yang terkait dengan kabupaten layak anak di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Pekon Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat) yang akan dikaji dengan menggunakan metode Penilitin yang bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Ibid.* 231.

bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan, Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam (Hadhanah), Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif, Dasar Hukum Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten, Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, Standar Kabupaten Layak Anak, Pengertian Kekerasan Terhadap Anak meliputi Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan, Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.

¹⁹ Sugiyono, *Ibid.* 244

- Bab III: Gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian Pekon Gedung Surian, sejarah singkat pekon Gedung Surian, Struktuk Organisasi Pekon Gedung Surian, Latar Belakang Kekerasan Seksual pada Anak di bawah umur di Pekon Gedung Surian, Isi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan Seksual Pada Anak.
- Bab IV: Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan Seksual Pada Anak, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Fiqh Siyash.
- Bab V: Penutup yang meliputi : simpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Secara etimologis (bahasa) *Fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹ Secara terminologis (istilah), menurut ulama *syara'* (hukum Islam), *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang *tafsil* (terinci, yakni dalil dalil atau hukum hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya, Al qur'an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al qur'an dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran *ijtihad*.²

Kata *siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan al Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.³ Secara terminologis *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari *hal ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar dasar ajaran

¹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al Fiqh*, Dar al Fikr al 'Arabi, Mishr, 1958, 6.

² T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, 26.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Al Siyasat al Syariat*, Dar al Anshar, Al qahirat, 1977, 4.

dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan kedalam penata sosial Islam.⁴

Konteks pengertian tersebut tugas *fiqh siyasah* Adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal usul negara dan sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. *Fiqh siyasah* juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.⁵

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah*

⁴Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Ombak, Yogyakarta, 2014, 28.

⁵Suyuti Pulungan, *Ibid*, 29

adalah pengaturan dan perUndang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perUndang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh* lain, dalam *Fiqh siyasah* juga menggunakan Ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qowaid fiqh*. Metode *ushul fiqh* antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan *ijtihad* nya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis Nabi.⁷

Pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1) *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (perundang-undangan)

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Abul A'la al Maududi mendefinisikan dustur dengan: “suatu dokumen yang memuat prinsip prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan sebuah negara”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami penggunaan istilah *Fiqh dusturi*, untuk nama satu

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14.

ilmu yang membahas masalah masalah pemerintahan dalam arti luas, sebab di dalam *dustur* itulah tercatat sekumpulan prinsip prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam sebuah negara sudah pasti perundang undangan serta Undang-undang lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁸

Siyasah dusturiyah menjadi salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain legislasi (bagian cara perumusan undang undang), konsep konsep konstitusi (undang undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi *syura* yang menjadi pedoman penting dalam perundang undangan tersebut.⁹

Fiqh siyasah konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Sebelumnya artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) ataupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah

⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 52-53.

⁹ Muhammad Iqbal, *kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

diserap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang Undang Dasar suatu negara.¹⁰

Siyasah Dusturiyah mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (*siyasah* penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at) seperti Undang Undang Dasar, undang undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. *Siyasah qadhaniyah syar'iyah* (*siyasah* peradilan yang sesuai menurut syariat) termasuk di dalamnya masalah masalah peradilan. *Siyasah idariyah syar'iyah* (*siyasah* administrasi yang sesuai dengan syariat) termasuk didalamnya masalah masalah administratif dan kepegawaian. Dan *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (*siyasah* pelaksanaan syari'at).

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari sudut pandang persesuaian dengan prinsip-prinsip agama merupakan perwujudan kemaslahatan manusia dan juga memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini mencakup hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya

¹⁰ Muhamad Iqbal, *Ibid*, 177-178

3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingan.

Keseluruhan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil *kulliy*, baik ayat Al Qur'an maupun Hadis, *maqsidu syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam hal mengatur masyarakat. Kedua, aturan dapat berubah yang disebabkan oleh situasi dan kondisi, termasuk dalam hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak secara keseluruhan.

Permasalahan didalam *fiqh siyasah dusturiyah* yakni membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang terdapat didalam masyarakat.¹¹

Oleh sebab itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹² Konsep *fiqh siyasah dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yaitu:

¹¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah Cet. Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2007), 47.

¹² Djazuli, *Ibid*, 48

- a) Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan sebagai patokan dalam berbagai macam bidang dalam hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur ahlak manusia.
- b) Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi serta kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat supaya mencapai kemaslahatan bersama.

Berlandaskan pengertian diatas dapat dipahami bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara serta urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, dan wajib ditaati oleh masyarakat selama semua peraturan itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Persoalan terkait tentang perlindungan anak melalui peraturan perUndang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum *fiqh siyasah dusturiyah* yakni Al-Qur'an dan Al-hadits serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu negara tidak melanggar syariat. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat Annisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-nisa:58)

Menurut Islam, *imamah* (kepemimpinan) merupakan pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, serta mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum, hingga mengatur urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.¹³

Ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pemimpin dalam pembahasan *fiqh siyasah dusturiyah* yakni dalam surat Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

¹³ Imam Al-Mawardi, Al ahkam As-Sulthaniyyah (jakarta: Qisthi Press, 2014), 32.

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-nisa:59)

Ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan menaati Allah, Rasul dan ulil Amri. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus menaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yakni seseorang yang bertanggungjawab yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok.

b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahl hall wa al aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim didalam suatu negara, seperti undang undang dasar, undang undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk didalamnya masalah masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah masalah.¹⁴

Adapun dalam penulisan ini mengkhususkan kajian *Siyasah Tanfidiyah*, yakni hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Pelaksana *Siyasah Tanfidiyah*, disebut *Al-shultah al-Tanfidziyyah*. Menurut al- Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam Istilah *ulul amri* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *Ulul amri* tidak hanya terbatas untuk anggota eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif dan eksekutif karena diartikan lebih luas.¹⁵

Konsep kepemimpinan dalam Islam sering disebut dengan *Khalifah* yang berarti wakil. Namun kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya kata *amir* dalam Bahasa Indonesia yang diartikan pemimpin formal. Selain *Khalifah*, ada banyak sebutan untuk Istilah pemimpin dalam Islam yang meliputi *Imamah/imam*, *Imara/Amir*, *Ra'in* dan *Wizarah/Wazir*.

Imamah menurut bahasa artinya “Kepemimpinan”. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, seperti laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *Imamah* juga sering digunakan untuk mengatur

¹⁴ H. A. Djazuli, *Ibid*, 48.

¹⁵ BU A’la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan 1993), 247

kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Secara terminologi Islam, *al-Imamah* bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia, yang menggantikan peran Nabi SAW.

Imamah secara epistemologi, kata *Imamah* berarti seorang pemegang kekuasaan atas umat Islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa *Imamah* itu juga merupakan *khalifah*, sebab orang yang menjadi *khalifah* adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah nabi wafat.¹⁶

Firman Allah dalam QS Annisa ayat 59 yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

¹⁶ Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 55

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-nisa: 59

Kepemimpinan dalam Islam adalah, Suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain serta usaha kerja sama sesuai dengan syarat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁷

a) Tanggung jawab

Ketika seseorang ditunjuk untuk memimpin sebuah lembaga atau institusi, maka sebenarnya seorang pemimpin mengemban tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin yang harus mampu mengemban tanggung jawabnya dihadapan manusia dan Allah.

Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(Q.S.Al-Anfal:8)

¹⁷Imam Amruzi Jaelani, *Ibid*, 41-45

b) Pengorbanan

Pemimpin harus berkorban untuk masyarakat entah itu berkorban materi, waktu maupun tenaga.

c) Kerja Keras

Pemimpin harus mampu bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat/ bawahan dalam suatu institusi maupun organisasi. Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُم

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk.”

(Q.S.Al-Bayyinah:7)

Ayat lain dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

d) Kewenangan melayani

Pemimpin merupakan pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Karena itu ia memiliki wewenang untuk melayani bawahannya dengan lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, visi misi perlu terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan hidup yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 7:

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لَأَنْفُسِكُمْ^ط وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا^ج
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا^ط وَجُوهَكُمْ
 وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا ﴿٧﴾

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Isra:7)

Ayat tersebut menjelaskan apabila kita berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kita sendiri.

e) Keteladanan dan kepeloporan

Seorang pemimpin dalam segala kondisi harus menjadi teladan dan pelopor bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus memiliki sikap yang baik dan benar sebagai pemimpin.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata, dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas. *Dusturiyah* dalam konteks ke Indonesiaan adalah Undang-undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-perundangan Indonesia.

2) *Fiqh Siyasah Dauliyah*

Dauliyah berarti daulat, kekuasaan, kerajaan, juga wewenang. Sedangkan *siyasah dauliyah* adalah kekuasaan seorang kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *siyasah dauliyah* lebih menjurus pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara.¹⁸

Siyasah Dauliyah juga bisa bermakna *siyasah* yang memiliki hubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara negara Islam dengan negara negara bukan Islam, mengenai tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berada di negara Islam, serta hukum dan peraturan yang membatasi hubungan antara Negara Islam dengan negara negara lain dalam situasi damai dan perang.¹⁹

¹⁸ Muhammad Rifqi Ihsani, "Siyasah Dauliyah". (Makalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013), 2

¹⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 40

Sebelum adanya agama Islam *Siyasah Dauliyah* sudah ada, *siyasah dauliyah* dismissal tersebut muncul karena adanya kelangsungan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia, keinginan tersebut terwujud dalam berbagai macam perjanjian antar negara juga adat kebiasaan internasional, yang menjadi sumber paling penting dalam hubungan damai pada masa itu.

Meski demikian, gejala hubungan antar negara yang kerap terjadi pada saat itu lebih sering ditandai dengan adanya peperangan, perang menjadi suatu olahraga tahunan bagi bangsa dan suku-suku tertentu. Dalam keadaan tersebut perang menjadi hubungan dasar diantara mereka. Tiap-tiap negara yang ada dituntut untuk selalu siap siaga dalam mempersiapkan diri untuk perang, baik dengan cara mempersiapkan senjata pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh.

Siyasah Dauliyah (hubungan internasional) mendapatkan banyak perubahan setelah datangnya Islam, yakni dalam hal perang harus menaati etika perang, harus menepati perjanjian dan lain sebagainya.²⁰

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyasah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyasah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Al-Islam atau tidak, adalah kesatuan Umat Manusia. Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia, dan damai dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk

²⁰ Muhammad Rifqi Ihsani, *Ibid*, 3.

saling memberikan kelebihan masing-masing. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini antara lain dinyatakan dalam Q.S An-nisa (1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. Annisa: 263-264)

[263] Maksud dari padanya menurut jumhur mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

[264] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

3) *Siyasah Maliyah*

Seperti di dalam *Fiqh Siyasah dusturiyah* dan *fiqh siyasah dauliyah*, di dalam *fiqh siyasah Maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah Maliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan perintah atau kekuasaan.

Fiqh Siyasah Maliyyah dalam perspektif Hukum Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, hadis dan praktik yang dikembangkan oleh khilafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Maliyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam hukum Islam. *Fiqh Siyasah Maliyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam sebab menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²¹

Fiqh Siyasah Maliyyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, sumber sumber keuangan negara, antara negara dan perorangan, *baitulmal* dan sebagainya. Di dalam *fiqh siyasah Maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologi *fiqh siyasah Maliyah* adalah mengatur politik keuangan.²²

Dalam *fiqh siyasah Maliyah* al qur'an menjadi sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut merupakan contoh sumber hukum *fiqh siyasah Maliyah* dalam al qur'an surat Al-hasyr :11

²¹ Nurcholis Majid, *Fqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), 273.

²² Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014), 91.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir[1467] di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya Kami pun akan keluar bersamamu; dan Kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti Kami akan membantu kamu," dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.”(Q.S. Al-Hasyr:11)

[1467] Maksudnya: Bani Nadhir.

Dan juga menyebutkan pada Q.S. Luqman: 20

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”(Q.S. Luqman:20)

Hadis menjadi sumber hukum kedua bagi *fiqh siyasah Maliyah* yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara dan pengeluaran negara yang sesuai. Kaitan antara *fiqh siyasah Maliyah* dengan hadis adalah bagian yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Keduanya bagaikan dua sisi bidang yang sama dan saling berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan karena *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi SAW. yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara negara Islam dengan negara negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan dengan negara negara lain dalam situasi damai dan perang.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

a. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam (*Hadhanah*)

Anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* yang belum dibebankan hukum baginya, kompilasi hukum Islam Pasal 105 menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berumur 18 tahun atau sesudah melangsungkan pernikahan.

Hadhanah berasal dari kata “*hidnan*” yang berarti lambung. Seperti kalimat “*Hashanah ath-thaairu baidahu*”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) mengempit

anaknya.²³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah merawat serta mendidik atau mengasuh anak kecil yang belum mampu menjaga serta mengatur dirinya sendiri.

Ulama *Fiqh* mendefinisikan *hadhanah* adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang belum bisa membedakan. Ia boleh tinggal dengan siapapun dari orang tuanya yang dia sukai. Namun dalam *syara'* menyuruhnya untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Apabila seorang perempuan, anak tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.²⁴

Hadhanah menurut ensiklopedia hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yakni mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang dapat membahayakannya, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.²⁵

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian *hadhanah* menurut istilah *fiqh* digunakan dua kata namun ditunjukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perpisahan/putusnyan perkawinan. Hal tersebut dibicarakan dalam *fiqh* sebab secara praktis antara suami

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (jakarta:pena Pundi Aksara, 2007), 37.

²⁴ Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqh Muslimah*, 341.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997), 37.

dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.²⁶

Pengertian *hadhanah* tersebut dapat diambil pengertian bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala macam kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Ulama *Fiqh* mendefinisikan *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz*. Hal tersebut menjadi patokan untuk menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Dasar hukum *hadhanah* dalam hal memelihara anak selama berada dalam ikatan perkawinan. Dasar hukumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِبَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ

²⁶ Amir Syarifuddin,, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , 327.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُ أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:233)

Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam Pemenuhan hak dasar anak adalah bagian menyeluruh dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁷ Hal ini bermakna bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga menjadi tanggung

²⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 45.

jawab seluruh bagian masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, yakni pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).²⁸

1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang diyakini oleh seorang anak sudah mutlak mengikuti agama yang diyakini kedua orang tuanya sampai anak bisa menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang diyakini sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan serta membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai dari periode kehidupan anak, yakni sejak dalam kandungan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti halnya bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama kepada anak yang baru lahir, yakni mulai dari menanamkan nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.

²⁸ Ibnu Ansori, *Ibid*, 46

2) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh sebab itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menjadi sebab anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah SWT menegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyanyang. ”

(Q.S. Al-Ahzab:5)

Ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam mencakup beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah

menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya suatu saat nanti. Hal tersebut juga berhubungan dengan masalah *muharramat* yakni aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan bisa bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa menurut pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran merupakan wajib hukumnya.²⁹

3) Hak Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik ataupun mental. Upaya pelaksanaan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan adalah salah satu hak kesehatan yang diberikan untuk anak. Bukan hanya pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak walaupun berada dalam kandungan amat berbahaya bagi tumbuh kembang anak.³⁰ Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika dalam kandungan, namun juga diberikan setelah anak lahir. Ketika anak telah lahir

²⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. 54.

³⁰ Ibnu Ansori, *Ibid*, 58.

didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), *khitan*, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu masih bayi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah:233)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat memperdulikan serta melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain ialah *khitan* yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. Khitan mengandung hikmah *religius* dan

kesehatan. Hikmah religius seperti halnya diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai alat penyempurna agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-Qabani dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah* bahwa *khitan* mempunyai beberapa pengaruh higienis, yakni seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan, serta dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya penyakit kanker.³¹

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam bukan hanya dalam bentuk *radhaah* dan *khitan*, namun juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yakni berupa bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit menjadi hal yang wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit ialah makan dan minum dengan baik serta tidak berlebihan. Orang tua hendaknya mengajarkan pada anak untuk membiasakan makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin ataupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.

Seperti itulah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Apabila orang tua sudah memberikan perhatian serta tanggung jawab dalam hal kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap

³¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 66.

mengemban amanat manusia sebagai khalifah *fil ardhi*.

4) Hak Pemeliharaan Akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak menjadi dasar yang penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan serta pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifzal-'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia merupakan hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا
فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah: 11)

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar selalu memperhatikan aspek iman

dan moral agama sebagai dasar sikap berperilaku setiap anak.³²

Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan adalah hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian lengkap serta upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua merupakan pemangku kewajiban yang paling utama. Jika orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, sebab dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.

Peningkatkan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila rancangan pendidikan anak bukan hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, namun juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercantum dalam Surat Al-Rum ayat 17-18:

فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ

الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ



³² Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 17.

“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur”.

(Q.S. Ar Rum: 17-18)

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh sebab itu wajib bagi orang tua untuk mengupayakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

5) Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yakni orang miskin, perempuan serta anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti bisa kita lihat menurut ajaran Islam bahwa Islam telah menginspirasi dunia dalam penanggulangan masalah kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan untuk setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Baqarah: 233).

Begitu pentingnya orang tua dalam hal menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya apabila ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

b. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Adapun hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni sebagai berikut:³³

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
4. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
5. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.³⁴

c. Dasar Hukum Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perUndang-undangan yang melindungi anak korban

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi.

Pasal 69A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 tahun 2011 tentang paduan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).³⁵

3. Standar Kabupaten Layak Anak

Bupati Lampung Barat memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Layak anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak
6. Hak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
7. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah kabupaten dengan

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.

8. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh pemerintah kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
9. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RDA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukuryang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan kabupaten, kecamatan, Desa Layak Anak.
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim atau lembaga koordnatif pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
11. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada OPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
12. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu menurut hukum.
13. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak terutama bagi anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.

14. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun sosial.
15. Forum anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Bupati.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai drajat ketiga.
17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah tingkat RT,RW, Desa dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati peraturan yang ada.
18. Pusat data dan informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
19. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan deskriminasi.
20. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.

Standar Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Lampung Barat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dalam Bab IV yakni:

Pasal 15

Pelaksanaan KLA dilakukan dengan pemenuhan hak anak yang terdiri dari 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 16

(1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang terintegrasi;
- b. tersedianya fasilitas informasi layak anak; dan
- c. tersedianya kelompok anak, forum anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan kelurahan/pekon.

(2) Tersedianya fasilitas informasi layak anak dilaksanakan melalui penyediaan informasi yang memenuhi ketentuan kelayakan informasi bagi anak.

(3) Kelayakan informasi bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Pasal 17

(1) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:

- a. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - b. Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Lembaga konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan penguatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
- (3) Penguatan kapasitas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan berupa bimbingan dan konsultasi dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 18

- (1) Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui:
- a. Tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. Gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. Air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. Imunisasi dasar lengkap;
 - e. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. Lingkungan bebas asap rokok;
 - g. Ketersediaan air bersih;
 - h. Akses jaminan sosial; dan
 - i. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
- a. Penyediaan puskesmas ramah anak di setiap kecamatan;
 - b. Penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintahan dan Pemerintahan Kabupaten atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. Penyelenggaraan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
 - d. Penyediaan air bersih;
 - e. Penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. Fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah didukung keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban menyediakan sarana bermain berupa lapangan olah raga yang ramah anak di setiap kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyediakan sarana Pemenuhan hak-hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan aktifitas sosial budaya berupa wahana kreatifitas, kelompok seni, kelompok aksi sosial, kelompok terampil.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui:

- a. Setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi; dan
 - b. Memastikan lembaga pendidikan dapat menumbuhkan kembangkan minat, bakat, kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab.
- (2) Kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan memastikan anak memiliki waktu beristirahat dan senggang untuk melakukan kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya.

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
- a. Perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.
- (2) Bupati dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Rumah Aman Anak.³⁶

4. Pengertian kekerasan terhadap anak

a. Pengertian kekerasan terhadap anak

Berasaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun,

³⁶Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah ketika setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Apabila tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah berganti ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang tertulis dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Kekerasan dalam hal ini adalah yang umum diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan perpaduan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian memiliki arti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini memiliki persamaan dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukan dengan kekerasan; menekan; memaksa dengan kekerasan serta melanggar dengan bentuk kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Kekerasan adalah tindakan yang disengaja yang mengakibatkan luka fisik atau tekanan mental. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga saat ini merupakan tendensi yang mengurangi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan jejak betapa kondisi kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.

Menurut Zakiah Drajat mengatakan bahwa mengenai jangkauan usia anak-anak dan dewasa

berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa pergantian antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, maupun cara berperilaku dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa³⁷.

b. Definisi kekerasan seksual pada anak

Kekerasan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban^{nya} dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi sosial, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).³⁸

Kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan suatu hubungan seksual ataupun kegiatan seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, dengan kekerasan ataupun tidak, yang bisa terjadi di berbagai tempat.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak, karena bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi dan

³⁷Zakiah Drajat, 1983, Kesehatan Mental, Inti Idayu Press, Jakarta, 101

³⁸N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, (jurnal fakultas psikologi Universitas Surabaya, Surabaya, 2016), 23

telekomunikasi banyak sekali konten-konten berbau seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga sering terjadi perlakuan anak-anak yang mencontoh perlakuan yang telah mereka lihat ataupun mereka dengar. Seiring kehidupan yang semakin modern, Banyak anak-anak yang sudah difasilitasi *smartphone* oleh orang tuanya hingga semakin mudah bagi anak-anak tersebut untuk mengakses informasi yang kadang para orang tua lalai untuk memberikan batasan dan pengawasan pada anak dari teknologi informasi.

Kekerasan seksual pada anak yang dimaksud adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan, perilaku, gerak-gerik seksual kepada anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, merasa ketakutan, depresi, trauma, ataupun mengalami luka secara fisik.

c. Bentuk bentuk kekerasan terhadap anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁹

Beberapa orang mungkin mengira kekerasan pada anak hanya berbentuk kekerasan fisik saja.

Secara ringkasnya kekerasan pada anak dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁴⁰

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar,

³⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, 425

⁴⁰ Abu Huraerah, *Child Abuse Cet 2*, Nuansa, Bandung, 2007, 47

menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, Kekerasan fisik ialah kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal.

2. Kekerasan Emosional

Bukan hanya fisik yang dapat tersakiti, mental anak juga dapat terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak sampai membahayakan perkembangan emosinya. Contoh bentuk kekerasan emosional, yakni membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, mengancam, dan juga tidak menunjukkan kasih sayang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala jenis kegiatan seksual terhadap anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga dapat melalui verbal maupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contoh bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak seksual dengan anak (mulai dari berciuman ataupun melakukan hubungan seks), memaksa anak mengambil foto atau video porno, melakukan *call sex*, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lainnya.

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang mengarah pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.⁴¹

Bentuk kekerasan seksual pada anak dapat digolongkan menjadi:⁴²

1) Pelecehan seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditunjukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berupa seperti:

- a) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- b) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- c) Menanyakan atau menyampaikan kepada orang lain tentang keinginan secara seksual

⁴¹ Abu Huraerah, *Child Abuse*, Cet 2, Nuansa, Bandung, 2007, 43.

⁴² Abu Huraerah, *Ibid*, 45.

ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tersebut tidak nyaman.

- d) Mengkritik atau bahkan mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat atau ukuran kelamin seseorang.

2) Pelecehan seksual non verbal

Pelecehan seksual non verbal adalah kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam kategori non verbal ini lebih menggunakan tindakan namun tidak bersentuhan secara langsung dengan korbannya, misalnya:

- a) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum.
- b) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda.
- c) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

3) Pelecehan seksual secara fisik

Kategori ini kekerasan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya:

- a) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban.
- b) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.

- c) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.⁴³

d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:

a. Faktor Internal

1) Orang tua/keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang begitu berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa ditelantarkan.⁴⁴ Beberapa contoh orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar memiliki tingkat tindakan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebab faktor stres yang dialami oleh orang tua tersebut.

2) Berasal dari dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh keadaan dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: anak menderita gangguan perkembangan, anak mengalami cacat tubuh, ketergantungan anak pada lingkungan, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang mempunyai perilaku

⁴³ Abu Huraerah, *Ibid*, 47.

⁴⁴ Nandang Mulyana, dkk, "Penanganan Anak Korban Kekerasan", al Izzah: Jurnal Hasil Penelitian, Vol 13, Nomor1 (Mei, 2018). Diakses melalui <http://researchgate.net/publication>. Tanggal 10 Februari.

menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.⁴⁵

3) Kelahiran di luar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki menjadi penyebab orang tua tidak mau bertanggung jawab. Sehingga untuk menutupi aibnya, mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuang anak tersebut.⁴⁶

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

2) Media masa

Media masa merupakan alat informasi. Media masa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya media

⁴⁵ Agustian Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, Buku Dasar Hukum Keluarga, (Banda Aceh, 2014), 106

⁴⁶ Agustian Hanapi, *Ibid.* 108

masa memiliki dampak yang positif, namun kadang juga bisa menjadi negatif.

3) Budaya

Budaya yang masih menganut praktik praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka harus dihukum. Bagi anak laki laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki laki tidak boleh cengeng atau anak laki laki harus tahan uji. Pemahaman tersebut mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadi anak sebagai pribadi yang kuat serta tidak boleh lemah.

4) Faktor Pendidikan

Akibat krisis kepercayaan pada arti pentingnya sekolah di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan baik pendidikan baik pendidikan formal maupun informal.⁴⁷

e. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak akan memberi dampak traumatic yang dialami oleh sang anak sebagai korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi yang dialami oleh anak yang mejadi korban kekerasan seksual akan susah untuk disembuhkan dari ingatan anak tersebut, terutama apabila pelaku masih berada serta tinggal tidak jauh dari lingkungan anak.⁴⁸

⁴⁷ Agustian Hanapi, *Ibid.* 109

⁴⁸ Susianty Selaras Ndari, Lathipah Hasanah, Muhib Rosyidi, *Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak* (Bandung: Edu Publisher, 2019), 35.

Anak yang mengalami kekerasan akan berdampak pada fisik maupun psikis anak tersebut. Adapun dampak jangka panjang kekerasan seksual pada anak ialah kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan depresi yang tinggi, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, malu, gangguan makan, kecemasan, penolakan, penindasan, masalah seksual, masalah pergaulan dengan lingkungan sekitarnya.

Depresi yang merupakan gejala jangka panjang yang paling umum dialami oleh korban kekerasan seksual. Setelah bertahun-tahun berpikiran negatif tentang diri sendiri memiliki perasaan tidak berharga dan lebih sering menghindari orang lain. Gambaran gejala depresi yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada anak ialah, sang korban sering mengalami rasa bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri. Korban sering kali mengambil tanggung jawab pribadi atas kekerasan seksual tersebut.

Masalah fisik dan gangguan makan juga merupakan efek jangka panjang kekerasan seksual masa kecil. Dampak kekerasan seksual pada anak beberapa diantara gejalanya ialah sang anak merasa citra tubuhnya merasa kotor atau jelek, tidak puas dengan tubuh atau penampilan, gangguan pola makan dan obesitas.⁴⁹

Gejala berupa penyakit mental yang kerap kali dialami oleh korban kekerasan seksual ialah berupa keluhan nyeri panggul, masalah pencernaan, sakit kepala dan kesulitan untuk menelan. Stres dan kecemasan seringkali menjadi efek panjang dari kekerasan seksual pada anak-anak. Lebih seringnya korban yang selamat mengalami kecemasan kronis, ketegangan, serangan kecemasan, dan *fobia*.

⁴⁹ Susianty Selaras Ndari, Lathipah Hasanah, Muhib Rosyidi, *Ibid*, 36.

Korban kekerasan seksual pada anak dapat mengalami kesulitan dengan kepercayaan, takut menjadi berbeda atau aneh, takut keintiman, kesulitan membangun batasan impersonal, perilaku pasif, dan terlibat dalam hubungan kasar. Dampak lainnya ialah berupa trauma pada anak yang dapat memicu perilaku amoral anak, sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan tidak menyenangkan yang telah dialaminya. Hal tersebut disebabkan oleh efek trauma yang muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap pihak yang telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadapnya.

Tindakan tersebut merupakan strategi anak dalam mengatasi konflik batin yang disebabkan oleh trauma. Pada fase ini, apabila anak sudah terpapar oleh faktor stimulus, seperti media yang berbau seksual, maka seorang anak akan cenderung mengalami gejala batin untuk mengekspresikan perilaku orientasi seksualnya. Apabila pihak keluarga dan lingkungan tidak memberikan pengawasan serta pengarahan yang tepat, maka seorang anak akan mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang seolah diketahuinya dari tayangan pornografi tersebut.

Lebih fatalnya lagi, perilaku seksual mereka seringkali dilakukan kepada anak yang pada umumnya berusia lebih muda dari mereka, dengan maksud untuk dapat melampiaskan hasrat seksualnya tanpa perlawanan dari korban. Dan pada anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya dapat dipengaruhi dan dibawah kontrol anak lelaki lainnya. Hal ini mengakibatkan gangguan emosional, korban dapat kembali melakukan pelecehan seksual kepada anak lainnya. Oleh sebab itu para pendidik harus segera menyadari tentang pentingnya memberi pendidikan

seksualitas pada anak sejak dini sebagai bentuk dari upaya pencegahan serta perlindungan dari kekerasan seksual pada anak dibawah umur.⁵⁰



⁵⁰ Susianty Selaras Ndari, Lathipah Hasanah, Muhib Rosyidi, *Ibid*, 39.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustian, Edi, dkk. *Buku Dasar Hukum Keluarga*, Banda Aceh, 2014.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI, 2006.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- BU A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah Cet. Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse*, Cet 2, Nuansa, Bandung, 2007.
- Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqh Muslimah*, jakarta: pustaka amani, 1995.

Idris, Munim. *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan Terhadap Anak*, jakarta Selatan: Noura e-Lite, 2017.

Imam Al-Mawardi, *Al ahkam As-Sulthaniyyah*, jakarta: Qisthi Press, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Jaelani, Imam Amruzi. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Khalaf, Abdul Wahab. *Al Siyasat al Syariat*, Dar al Anshar, Al qahirat, 1977.

Majid, Nurcholis. *Fqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*, Ombak, Yogyakarta, 2014.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depan*, Jakarta: Lipi Press, 2007.

Ridwan Sanjaja, et all, *Parenting Untuk Pornografi di Internet*, Jakarta: PT Elex media Komputindo, 2010.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jakarta:pena Pundi Aksara, 2007.

Shiddieqy, T.M.Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Susianty, Lathipah, dkk. *Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak*, Bandung: Edu Publisher, 2019.

Syahri. *pokok pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Trwijati, N.K. Endah. *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, jurnal fakultas psikologi Universitas Surabaya, Surabaya, 2016.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Bandung: Media Pressindo,2018.

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul al Fiqh*, Dar al Fikr al ‘Arabi, Mishr, 1958.

Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta 1983.

Zein, Mohamad Fadhilah. *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*, Mohamad Fadhilah Zein, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (25).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Naskah Ilmiah

Muhammad Rifqi Ihsani, "*Siyasah Dauliyah*". Makalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013.

Wawancara

Sari, Rica Nirmala. wawancara dengan penulis, Pelaksana Teknis Kasi Pemerintahan Pekon Gedung Surian, 7 Januari 2021.

Istikomah, wawancara dengan penulis, Pelaksana Kasi Perencanaan Pekon Gedung Surian, 7 Januari 2021.

Armadi, wawancara dengan penulis, Sekertaris Pekon Gedung Surian, 8 Januari 2021.

Zainal, wawancara dengan penulis, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Pekon Gedung Surian, 7 Januari 2021.

Hestya, Dwi. wawancara dengan penulis, Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Pekon Gedung Surian, 7 Januari 2021.

Sukardi, wawancara dengan penulis, Penyuluh Agama Pekon Gedung Surian, 7 Januari 2021.

Mariaulfa, Sinta. wawancara dengan penulis, Orang Tua/wali anak, 7 Januari 2021.

Boimin, wawancara dengan penulis, Peratin Pekon Gedung Surian, 8 Januari 2021

Samsul, wawancara dengan penulis, Kasi Dnas Gugus Tugas Kaupaten Layak Anak, 8 Januari 2021.

Maryam, wawancara dengan penuis, orang tua/wali anak, 8 Januari 2021.

Sumber On-line

Nandang Mulyana, dkk, "*Penanganan Anak Korban Kekerasan*", al Izzah: Jurnal Hasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018). Diakses melalui <http://researchgate.net/publication>. Tanggal 10 Fenruari.